

## Toleransi Tanpa Batas

### Outlook Agamawan dan Kebijakan Migrasi Suku Batak Kristen ke Pedalaman Duri Bengkalis

---

Hamdan Dauly

*Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Email: hamdandly@yahoo.co.id*

---

#### Abstract

This study aims to explain the concept of policy that needs to be implemented by the government in counteracting of religious intolerance. Based on the factors of population equality and economic prosperity, the government must be regarding the socio-religious aspect of the migration program in the interior of Duri Bengkalis, Riau. In order to realize the ideals of national social development, the portrait of the process of migrating Christian Bataks' to the interior of Duri must be an outlook for the social conflicts that occur. Highlighting the case of intolerance between Christian Bataks' and Malay Muslim tribes Duri is important to be contextually examined through a research approach. As a literacy for developing unlimited tolerance in the frame of pluralism, it is very appropriate if this study is analyzed using the perspective of the sociology of development. The process of developing nation-building through a migration program, I take field data through qualitative research. The data source was taken directly to the informant with the snowball sampling technique. After the data were analyzed by the process of data reduction, data display, and conclusion, I found that government policy was not optimal in accommodating the migration program. There are still occur caused by the inferior of people for the meaning of pluralism. Although in general, the community has lived up to the philosophy of Pancasila, these implications are lowly in everyday life. Efforts to reduce conflicts that occur in Bengkalis, the government needs to develop a roadmap for policies on religious dialogue. Religious harmony is very important. It is impossible to realize tolerance without limits if the supporting instruments are not a priority agenda. Especially in areas prone to an inter-religious conflict which are actually caused by economic disparity and political oligarchy.

Keyword: migration; harmony; tolerance; pluralism; preaching message.

#### Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan konsep kebijakan yang perlu diterapkan oleh pemerintah dalam menangkal intoleransi beragama. Selain faktor pemerataan penduduk dan kesejahteraan ekonomi, penting kiranya pemerintah memperhatikan aspek sosial-keagamaan



atas kasus migrasi yang terjadi di pedalaman Duri Bengkalis, Riau. Agar cita-cita pembangunan sosial secara nasional dapat terwujud, potret proses migrasi suku Batak Kristen ke pedalaman Duri harus menjadi *outlook* atas konflik sosial yang terjadi. Menyoroti kasus intoleransi antara suku Batak Kristen dan Muslim Melayu Duri menjadi penting untuk ditelaah secara kontekstual melalui pendekatan riset. Sebagai acuan mengembangkan toleransi tanpa batas dalam bingkai pluralisme, sangat pantas jika kajian ini, dianalisis menggunakan perspektif sosiologi pembangunan. Proses mengembangkan pembangunan bangsa melalui program migrasi, penulis mengambil data lapangan melalui penelitian kualitatif. Sumber data diambil langsung kepada informan dengan teknik *snowball sampling*. Setelah data dianalisis dengan proses reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan, penulis menemukan optimalnya kebijakan pemerintah dalam mengakomodir program migrasi. Hal utama yang menjadi pemicunya adalah masih rendahnya masyarakat memahami makna pluralisme. Walaupun secara umum masyarakat sudah menghayati falsafah Pancasila, tetapi masih rendahnya implikasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Upaya meredam konflik yang terjadi di Bengkalis, pemerintah perlu menyusun *roadmap* kebijakan tentang dialog agama. Kerukunan agama sangat penting ditegakkan. Mustahil dapat mewujudkan sikap toleransi tanpa batas jika instrumen pendukungnya bukan menjadi agenda prioritas. Terutama di daerah-daerah yang rawan konflik antar umat beragama yang sejatinya disebabkan oleh faktor kesenjangan ekonomi dan oligarki politik.

Kata Kunci: migrasi; harmoni; toleransi; pluralisme; pesan damai.

## Pendahuluan

Wilayah nusantara dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika merupakan tempat tinggal yang aman, sejuk, dan damai bagi setiap warga negara. Masyarakat Indonesia yang plural baik dari segi suku, agama, bahasa, dan budaya tidaklah menjadi penghalang untuk beraktivitas di wilayah mana pun. Adanya perbedaan agama, budaya, bahasa, etnis dan lain-lain, sesungguhnya kekayaan khazanah budaya bangsa yang harus dipelihara dengan baik. Pluralitas masyarakat Indonesia bukanlah menjadi penghalang dan menjadi potensi konflik manakala perbedaan tersebut bisa dikelola dengan baik. Semua komponen masyarakat mendambakan kerukunan dan kedamaian di tengah perbedaan yang ada.<sup>1</sup>

Di tengah perbedaan dan kondisi geografis Indonesia yang luas, dalam konsep wawasan nusantara menjadi syah bagi setiap warga negara untuk mencari kehidupan, pekerjaan, dan juga beribadah sesuai keyakinan masing-

---

<sup>1</sup> Kodiran, *Pluralitas dan Kekayaan Kazanah Budaya Indonesia* (Bandung: Rosdakarya, 2013), hal. 86.

masing. Ketika satu daerah memiliki penduduk yang padat, sementara daerah lain memiliki penduduk yang jarang, maka terjadilah kegiatan migrasi (perpindahan penduduk) sebagai bentuk dari pemerataan penduduk. Selain itu, migrasi juga bertujuan untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat, sehingga daerah yang asalnya lambat secara pertumbuhan ekonominya, akan menjadi lebih maju dengan adanya kegiatan migrasi.<sup>2</sup>

Sejatinya, masyarakat Indonesia yang plural selalu mendambakan kerukunan, kedamaian, toleransi dan saling menghargai. Toleransi tidak hanya sekedar retorika, namun sudah teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Di berbagai daerah di nusantara, hubungan umat beragama telah lama terjalin dengan harmonis dan toleran. Bahkan budaya gotong royong yang begitu kuat di masyarakat telah mampu merajut tali toleransi.<sup>3</sup>

Tindakan *intoleransi* terhadap kelompok lain, karena perbedaan politik, keyakinan, etnis, budaya dan lain-lain, kini semakin marak di tengah masyarakat. Akibat dari tindakan intoleransi tersebut membuat munculnya suasana *disharmoni* (tidak harmonis), dan bahkan konflik antara kelompok satu dengan kelompok lain. Kasus perusakan rumah/tempat ibadah di Tanjung Balai (Sumut), Tolikara (Papua), penolakan pembangunan tempat ibadah di berbagai daerah, hingga maraknya ancaman teroris yang mengatasnamakan agama, menambah daftar panjang tindakan intoleransi dewasa ini. Kasus-kasus intoleransi jika tidak segera diatasi dengan baik, akan bisa menjadi “bom waktu” yang akan mengoyak semangat nasionalisme dan persatuan bangsa. Demikian pula dengan paham teroris yang dalam perjuangannya sering mengatasnamakan agama, dan menafsirkan makna “jihad” dengan sempit dan subyektif, menjadi tantangan serius dalam mewujudkan kerukunan di tengah masyarakat. Padahal sejatinya nilai-nilai Islam memiliki komitmen yang tinggi pada kerukunan, toleransi dan kehidupan yang harmonis.

<sup>2</sup> Ahmad Lutfi, *Transmigrasi dan Penguatan Ekonomi* (Jakarta: Gramedia, 2009), hal. 137.

<sup>3</sup> Burahanuddin Yahya, *Kerukunan dan Toleransi di Tengah Pluratis Bangsa* (Jakarta: Yayasan Ilmu, 2008), hal. 59.

Sesungguhnya budaya masyarakat Indonesia yang pluralistik ini terkenal sangat toleran, santun, dan menghargai perbedaan. Kemauan untuk menghargai dan menghormati perbedaan adalah bagian dari kebudayaan yang sangat luhur. Masyarakat yang menghargai nilai-nilai budaya tidak akan terjebak pada konflik, karena bagi masyarakat yang berbudaya, perbedaan adalah suatu keindahan yang harus dipelihara dengan baik. Kebudayaan merupakan segala sesuatu yang diciptakan oleh akal budi manusia. Manusia (masyarakat) dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan, karena keduanya merupakan suatu jalinan yang saling erat berkaitan. Kebudayaan tidak akan ada tanpa ada masyarakat dan tidak ada satu kelompok manusia pun, betapa terasing dan bersahajanya hidup mereka, yang tidak mempunyai kebudayaan.

Jika dikaji dari ajaran masing-masing agama (Islam, Katholik, Kristen, Hindu dan Budha), sesungguhnya, semua mengajarkan tentang kerukunan. Tidak satu pun agama yang mengajarkan konflik. Namun dalam praktiknya, konflik internal dan antar umat beragama terkadang tidak bisa dihindari. Konflik itu bisa terjadi karena emosi umat yang tak terkendali. Untuk menghindari terjadinya konflik antar umat beragama, perlu terus ditingkatkan pembinaan kehidupan umat beragama oleh tokoh-tokoh agama.

Dalam kasus konflik umat beragama misalnya, faktor penyebabnya bukan dari doktrin agama, melainkan bisa karena faktor politik dan sosial ekonomi. Kesenjangan ekonomi antara penganut agama yang satu dengan penganut agama yang lain, bisa menjadi sumber konflik antar umat beragama. Demikian pula dengan perlakuan politik yang dianggap kurang adil berdasarkan agama yang dianut, bisa merambah pada terjadinya konflik antar umat beragama. Sebab dengan perlakuan yang dianggap kurang adil, akan membuat kecemburuan dari kelompok satu terhadap kelompok lain. Jika masyarakat sudah terjebak pada kondisi intoleransi dan disharmoni, membuat masyarakat dilanda konflik yang menakutkan.

Kekerasan dan konflik atas nama agama di negeri ini, statemen yang sama dari para peneliti lokal, pemicu utamanya adalah kesenjangan ekonomi dan faktor politik semata. Kasus Cikesik, Lombok, Tasikmalaya, Yogyakarta,

Madura, Ambon, dan beberapa kawasan lain di Indonesia juga karena persoalan ekonomi dan politik. Bukan karena agama yang mengajarkan tentang kerukunan, cinta kasih, dan menenarkan kedamaian dunia.<sup>4</sup>

Ajaran agama sangat tidak pantas menyebar permusuhan dengan mengatasnamakan agama. Aktualisasi dari pembinaan umat beragama sesungguhnya sudah dilakukan dengan baik. Tokoh-tokoh agama dengan tidak mengenal lelah sudah memberi khutbah dalam rangka membina umat. Lewat pembinaan tersebut, umat beragama diharapkan bisa menjadi kelompok masyarakat yang santun, toleran serta mencintai kerukunan dan perdamaian. Umat beragama yang taat tentu tidak akan memusuhi umat agama lain, walaupun ada perbedaan di antara mereka.

Perbedaan agama bukan menjadi penghalang dalam membangun bangsa. Apalagi tindakan yang menimbulkan konflik. Hal ini dapat dilakukan jika agama dimaknai secara benar sehingga menjadi perekat sosial yang utuh dan kokoh. Para *founding father* bangsa ini membingkainya dengan simbol *bhinneka tunggal ika*; berbeda-beda tetapi tetap satu. Perbedaan pandangan diantara para pendiri bangsa berjihad secara damai yang akhirnya terjadi kesepakatan dengan fondasi dasar negara Pancasila.

Pancasila sebagai titik temu penyatuan perbedaan menjadi simbol keutuhan bangsa. Semua warga negara dapat mengambil peran dalam pembangunan sebagaimana cita-cita negeri ini. Atas kesepakatan suci ini sesungguhnya musuh utama negara Indonesia adalah korupsi, terorisme, kebodohan, kemiskinan, konflik agama dan ancaman disintegrasi bangsa. Dalam menghadapi ancaman nyata, semua umat beragama bisa bersatu padu menyusun kekuatan dalam rangka membela negara. Untuk itu diperlukan kerukunan umat beragama (persatuan yang kuat) dalam menghadapi musuh

---

<sup>4</sup> Al Makin, "Homogenizing Indonesian Islam: Persecution of the Shia Group in Yogyakarta," *Studia Islamika* 24, no. 1 (2017): 1-32, <https://doi.org/10.15408/sdi.v24i1.3354>; E Budiwanti, "Pluralism Collapses: A Study of the Jama'ah Ahmadiyah Indonesia and Its Persecution," *Asia Research Institute Working Paper*, no. 117 (2009), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1645144>; Jacqueline Hicks, "Heresy and Authority: Understanding the Turn against Ahmadiyah in Indonesia," *South East Asia Research* 22, no. 3 (2014): 321-39, <https://doi.org/https://doi.org/10.5367/sear.2014.0216>; Lukman Nul Hakim, "Tindak Kekerasan Terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia: Sebuah Kajian Psikologi Sosial," *Aspirasi* 2, no. 1 (2012): 23-44.

yang menjadi penyakit bangsa kita.

Sejarah telah mencatat bahwa bangsa Indonesia yang plural, memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Dasar negara Pancasila dan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, menjadi modal penting dalam mewujudkan kerukunan di tengah pluralitas yang ada. Sejarah juga mencatat bagaimana kebesaran jiwa tokoh-tokoh Islam yang rela menghapus tujuh kata dari sila pertama dalam piagam Jakarta demi persatuan dan kesatuan bangsa. Awalnya sila pertama Pancasila dalam konsep piagam Jakarta berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Setelah tujuh kata tersebut dihapus, maka sila pertama Pancasila menjadi, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Alamsyah Ratu Perwiranegara, kerelaan tokoh-tokoh Islam menghapus tujuh kata dalam sila pertama Pancasila adalah merupakan sumbangan luar biasa dalam mewujudkan kokohnya persatuan bangsa.<sup>5</sup>

Sejatinya masyarakat Indonesia yang plural selalu mendambakan kerukunan, kedamaian, toleransi dan saling menghargai. Toleransi tidak hanya sekedar retorika, namun sudah teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Di berbagai daerah, hubungan umat beragama telah lama terjalin dengan harmonis dan toleran. Bahkan budaya gotong royong yang begitu kuat di masyarakat telah mampu merajut tali toleransi. Ini dibuktikan dengan adanya bantuan umat Kristen ketika umat Islam membangun masjid.<sup>6</sup> Demikian pula ketika umat Kristen membangun Gereja, ada bantuan dari umat Islam. Sungguh indah tali toleransi umat beragama di nusantara dengan munculnya budaya gotong royong, saling asih dan asuh antara kelompok yang berbeda agama.

Kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok diharapkan bisa menjadi pelajaran berharga bagi bangsa ini agar jangan lagi terulang dan berpotensi

---

<sup>5</sup> Ap Budiyono, *Membina Kerukunan Hidup Antarumat Beriman* (Yogyakarta: Kanisius, 1989).

<sup>6</sup> Tim Peneliti Infid, “Studi Tentang Toleransi dan Radikalisme di Indonesia, Pembelajaran Dari 4 Daerah, Tasikmalaya, Jogjakarta, Bojonegoro, dan Kupang” (Jakarta, 2016).

mengoyak persatuan bangsa.<sup>7</sup> Tindakan intoleransi terhadap kelompok lain, karena perbedaan agama, etnis dan budaya, harus disikapi dengan pikiran yang jernih. Apalagi menyangkut simbol-simbol agama, begitu mudah menyulut emosi yang terkadang sangat sulit untuk dikontrol. Kedewasaan berpikir dan semangat nasionalisme yang tinggi harus dikedepankan untuk mengurai persoalan yang muncul di berbagai daerah yang rawan konflik. Jangan sampai ada kelompok lain yang sengaja memprovokasi masyarakat, sehingga menimbulkan kondisi yang lebih runyam lagi.

Bagi bangsa Indonesia yang plural, baik dari aspek agama, budaya, aliran, etnis dan lain-lain, bisa menjadi potensi kerukunan dan juga bisa menjadi potensi konflik. Manakala persoalan pluralitas ini dikelola dengan baik, akan bisa menjadi potensi kerukunan. Sebaliknya manakala persoalan pluralitas tidak dikelola dengan baik, akan bisa menjadi potensi keresahan dan konflik yang melelahkan di tengah masyarakat. Di sinilah dibutuhkan pendekatan dialog yang baik, agar bisa memberi kesejukan bagi umat, sehingga bisa memperkokoh keutuhan dan persatuan bangsa. Dialog yang baik di tengah perbedaan yang ada, akan bisa memberi kesejukan, bukan justru mempertajam perbedaan, menonjolkan eksklusivisme, atau justru membuka potensi konflik di tengah masyarakat.

Kasus konflik juga terjadi proses migrasi suku Batak Kristen di daerah Melayu Muslim di pedalaman Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau. Masyarakat Batak Kristen yang melakukan migrasi ke daerah pedalaman Duri sudah berlangsung puluhan tahun. Namun seiring dengan perkembangan waktu dan jumlah mereka pun semakin banyak, muncul benih-benih konflik yang semakin membesar. Adanya perbedaan etnis, budaya dan agama membuat kurang harmonisnya komunikasi antara warga pendatang dengan warga setempat.

Masyarakat Melayu yang tinggal di Duri, Bengkalis, Riau terkenal taat menjalankan Islam mulai terusik dengan kehadiran suku Batak Kristen yang

---

<sup>7</sup> Moch Nur Ichwan, "MUI, Gerakan Islamis, dan Umat Mengambang," *Ma'arif Institute* (Jakarta, 2016).

semakin banyak jumlahnya. Terlebih suku pendatang sudah banyak memiliki lahan atau tanah yang disebabkan etos kerja mereka. Secara langsung, etos kerja ini berdampak pada perkembangan dan peningkatan ekonomi suku Batak Kristen. Ihtwal, masyarakat setempat mulai tersisih dan tertinggal secara peningkatan kesejahterannya. Akibat dari perbedaan ekonomi yang menohok, membuat masyarakat asli tersisih dan lambat laun menuai percikan konflik. Simbol-simbol agama, seperti pendirian Gereja, mulai ditentang. Puncaknya ketika suku Batak Kristen memaksakan diri untuk membangun Gereja karena kebutuhan ibadah—walaupun belum memenuhi syarat perijinan—memicu penolakan keras dari umat Islam dengan perusakan Gereja.<sup>8</sup>

Di sisi lain, proses migrasi suku Batak Kristen dari daerah Tapanuli Utara, Sumatera Utara, ke daerah pedalaman Duri adalah program pemerintah. Dengan tujuan untuk pemerataan penduduk dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun karena perbedaan etnis, budaya dan agama, menjadikan komunikasi antar warga kurang harmonis. Tak salah jika memicu benih-benih konflik. Padahal konsep wawasan nusantara dan Bhinneka Tinggal Ika, menghendaki masyarakat yang rukun, damai dan saling menghargai. Pluralitas, sejatinya tidak harus menjadi potensi konflik dan justru menjadi khazanah budaya yang patut dipelihara. Atas masalah yang tersaji, penulis hendak membahas kebijakan negara tentang kerukunan umat beragama. Selain itu, artikel ini mencoba menjelaskan proses migrasi suku Batak Kristen ke daerah pedalaman Duri, Bengkalis, Riau.

Sasaran artikel ini adalah mengkontekstualisasikan gagasan pluralisme di tengah masyarakat dengan potensi konflik yang terjadi di daerah pedalaman Duri, Bengkalis, dengan menyoroti beberapa pertikaian konflik yang terjadi pada dasawarsa terakhir ini. Sebagai proses migrasi suku Batak Kristen ke daerah pedalaman Duri telah memicu konflik horizontal sehingga perlu segera adaptif terkait masalah yang ada. Paper ini bukan *blue print* perubahan kebijakan. Namun hanya sebuah diskursus baru yang menyoroti konflik yang

---

<sup>8</sup> Douglas E. Ramage, *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance* (London: Routledge, 1995).

terjadi. Capaian tulisan berupa narasi yang patut untuk didiskusikan ulang sehingga ada kebaruan yang ditawarkan tentang konflik di suku pedalaman.

Awalnya artikel ini merupakan hasil penelitian di suku pedalaman Duri Bengkalis. Data-data dihimpun dari hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan. Setelah data terkumpul lalu dianalisis dengan menggunakan tiga pendekatan; reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Dengan pendekatan sosiologi pembangunan sebagai pisau analisis dalam perspektif kualitatif, artikel ini memetakan tentang potensi konflik yang diolah dan dianalisis melalui metode triangulasi data. Informan dipilih sesuai kebutuhan dengan metode *purposive sampling*. Penentuan informan dipilih menggunakan teknik *snowball sampling*.<sup>9</sup>

## Bangsa Pluralis dan Konsep Kebijakannya

Sejak awal, artikel ini akan mencoba menjawab tentang kebijakan negara dalam mengimplementasikan gagasan pluralisme. Sedari demikian, cakupan yang penulis analisis pada kajian ini menyoroti konsep awal pluralisme sebagai nilai kerukunan. Kemudian konsep ini dapat dijadikan sebagai instrumen negara dalam menyusun kebijakan kerukunan umat beragama.

### *Konsepsi Kerukunan Berwawasan Multikultural*

Bangsa yang pluralis tidak lepas dari cakupan budaya yang multikultur. Karena itu, budaya merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem kebudayaan. Secara etimologi, kebudayaan sendiri lahir dan diciptakan oleh akal budi manusia. Pada aspek ini kebudayaan menjadi ciri khas dari manusia. Kebudayaan dan manusia merupakan dua instrumen yang tidak

---

<sup>9</sup> Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), hal. 15-18.; Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2014); John W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010); Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2011); Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).

dapat dipisahkan karena saling terkait. Keterkaitan ini secara simplistik menyertakan manusia berkelompok dan saling berinteraksi. Semuanya bagian dari subyek budaya yang dimiliki masing-masing manusia.<sup>10</sup>

Budaya juga bisa dipahami sebagai jejaring makna dan pemaknaan. Budaya sebagai sebuah deskripsi dari cara hidup tertentu yang mengekspresikan sejumlah makna dan nilai yang tertentu. Sebagai jejaring makna, budaya terkait erat dengan ranah-ranah lain dalam hidup manusia, seperti politik, agama, kekuasaan, pendidikan, pemerintahan, bahasa dan masih banyak lagi ranah yang lain.<sup>11</sup>

Mudji Sutrisno mengistilahkan, kreativitas kebudayaan merupakan misteri dari tetap tumbuhnya kemanusiaan ketika peradaban dihadapkan pada ujian-ujian sejarah. Diri tidak sendiri dalam merajut makna dan mengikat peristiwa. Kita selalu dihadapkan pada fakta keberagaman, kebhinekaan, terlebih dalam konteks masyarakat Indonesia yang multi kultur, multi etnis, multi agama, dan multi dimensi lainnya.<sup>12</sup>

Ada tiga arus penggunaan istilah budaya yang sering digunakan sebagai literasi modern. Pertama, mengacu pada perkembangan intelektual, spiritual, dan estetis dari seorang individu, sebuah kelompok atau masyarakat. Kedua, yang mencoba memetakan khazanah kegiatan intelektual dan artistik sekaligus produk-produk yang dihasilkan (film, benda-benda seni, teater). Dalam penggunaan ini, budaya kerap diidentikkan dengan istilah “kesenian”. Ketiga, menggambarkan keseluruhan cara hidup, berkegiatan, keyakinan-keyakinan, dan adat kebiasaan sejumlah orang, kelompok atau masyarakat.<sup>13</sup>

Satu dari tiga istilah penting budaya yang menjadi literasi modern kerap menggambarkan poin nomor tiga. Bingkai budaya yang menggambarkan cara hidup, berkegiatan, dan keyakinan tidak lepas dari cakupan kajian multikulturalism. Secara definisi, multikultural merupakan istilah yang

---

<sup>10</sup> Sutrisno Mudji and et.al, *Cultural Studies Tantangan Bagi Teori-Teori Besar Kebudayaan* (Yogyakarta: Koekoesan, 2007), hal. 66.

<sup>11</sup> Mudji and et.al, *Cultural Studies Tantangan Bagi Teori-Teori Besar Kebudayaan*.

<sup>12</sup> Mudji and et.al.

<sup>13</sup> Raymond Williams, *Cultural Theory: An Introduction* (Oxford-UK: Blackwell Publishers, 2001), hal. 2.

memerlukan penjelasan teoritis tentang bagaimana suatu kehidupan yang rukun dalam suatu masyarakat majemuk dapat terwujud. Kalangan ilmuwan sosial mengajukan beberapa pandangan sebagai berikut.

Menurut Gerald A. Arbuckle, kehidupan multikultural bukan merupakan suatu perintah melainkan tumbuh dari kesadaran. Dalam definisi tersebut Arbuckle juga menolak adanya anggapan bahwa multikulturalisme merupakan penemuan dari beberapa orang ahli. Dua hal yang ditolaknya, perintah dan ide beberapa ilmuwan, mengakibatkan pandangan bahwa multikulturalisme merupakan gerakan dari bawah (*bottom-up*) dan melibatkan semua lapisan masyarakat. Di mata Arbuckle, multikulturalisme dengan demikian merupakan bentuk inkulturasi karena budaya dengan cepat berubah sendiri dan membentuk sesuatu yang baru. Perubahan terjadi karena keterlibatan semua komponen dalam struktur yang berperan, sehingga bentuk kehidupan multikultural terwujud.<sup>14</sup>

John Rex membedakan tiga pendekatan bertolak dari pandangan ruang publik dan ruang privat sebagai model masyarakat multikultural. Model pertama adalah adanya pembagian dalam kehidupan sosial antara ruang publik (*public domain*) dan ruang pribadi (*private domain*). Pada ruang publik, anggota masyarakat terikat oleh aturan-aturan yang ditetapkan dan diterima bersama. Sementara di ruang pribadi masing-masing individu bisa mengekspresikan pandangannya sendiri dan menganut nilai-nilainya sendiri atau kelompoknya yang homogen.<sup>15</sup>

Model kedua adalah suatu bentuk kesamaan nilai di ruang publik dan di ruang privat. Nilai-nilai moral dan budaya yang digunakan ditentukan dan disepakati bersama untuk dijadikan sebagai pedoman tingkah laku dan berinteraksi. Dengan demikian, bentuk hubungan sosial budaya yang terjalin menunjukkan homogenitas dan tidak terdapat heterogenitas. Kesamaan dengan bertumpu pada suatu nilai yang dominan digunakan sebagai pengikat

<sup>14</sup> Gerald A. Arbuckle, "Multiculturalism, Internationality, and Religious Life," *Review for Religious* 54, no. 1 (1995).

<sup>15</sup> Teori ini sering dikenal sebagai *two domain thesis* dan pertama kali diterapkan pada wilayah persemakmuran (*commonwealth*) Inggris. Yunas Samad, "The plural guises of multiculturalism; conceptualizing a fragmented paradigm", dalam Modood Tariq and Werbner Prina, *The Politics of Multiculturalism in the New Europe: Racism, Identity and Community* (London: Zed Books, 1997), hal.253.

dalam mengatur kehidupan bersama.<sup>16</sup>

Model ketiga, John Rex mengajukan model yang ditandai dengan adanya kebebasan luas untuk mengekspresikan dan menganut nilai budaya masing-masing baik pada bidang privat maupun bidang publik, sehingga terbentuk suatu kondisi pluralitas. Ikatan yang membentuk kesatuan dari model masyarakat ini adalah adanya sikap saling menerima dan saling menghargai. Bentuk atau model masyarakat ini menurut Rex disebut sebagai *egalitarian multiculturalism*.<sup>17</sup>

Tiga model yang ditawarkan oleh Rex sebagai bentuk kerangka teoritis bagi masyarakat multikultural dan memiliki penerapan sendiri-sendiri di masyarakat dan bangsa. Model pertama merupakan bentuk multikultural yang ideal karena tidak menghilangkan perbedaan ataupun menyamakan perbedaan. Pada model pertama ini ada ikatan atau nilai bersama di ruang publik tetapi tetap ada kebebasan menganut nilai sendiri di ruang privat atau di komunitas masing-masing. Semua kelompok dapat menyumbangkan nilai sebagai pedoman atau dasar bagi kehidupan bersama. Model ini ideal diterapkan di Indonesia karena makna yang kurang lebih sama dengan “Bhinneka Tunggal Ika”. Produk ini menampakkan adanya pandangan keseragaman di atas keberagaman dalam kehidupan multikultur.

Pandangan konseptual ini akan membantu mengarahkan dan mempertajam analisis atas sintesa fakta dan rekonstruksinya. Selain untuk menganalisis fakta, teori tersebut dapat menjadi peta jalan bagi terwujudnya kerukunan masyarakat yang kuat, tetapi dengan catatan penggunaan teori

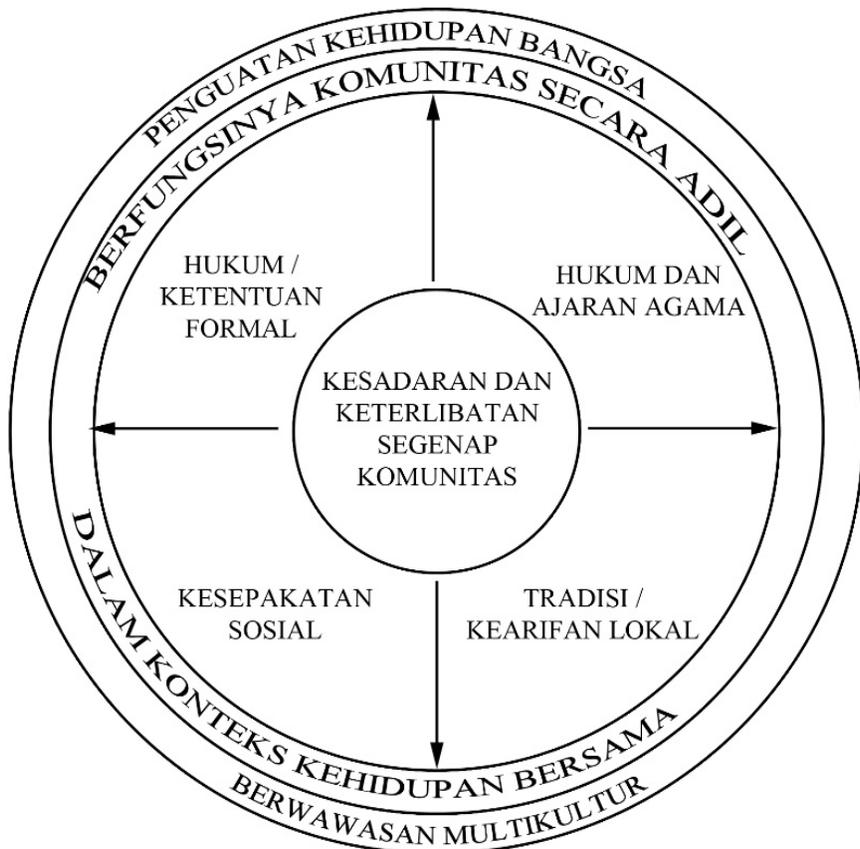
---

<sup>16</sup> John Rex, “Multicultural and Plural Societies,” in *The Ethnicity Reader*, ed. Guiberneau Montserrat and John Rex (London: Polity Press, 1997), hal. 210. Dalam hal ini, Rex melihat adanya budaya asli dan budaya imigran yang hidup bersama. Tentu saja antara keduanya tidak mungkin disatukan mengingat latar belakang budaya yang berbeda. Untuk mencapai keharmonisan, antara keduanya harus dibuat kesamaan nilai sehingga antara kedua kelompok bisa saling menerima. Peter van de Veer, *Nation and Migration: The Politics of Space in the South Asia Diaspora* (Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1995), hal. 147.

<sup>17</sup> Dalam kajian Rex, bidang publik hendaknya terbuka bagi semua kesamaan istilah budaya dari masing-masing unsurnya, sementara masing-masing komponen dalam masyarakat memberlakukan nilai-nilai budayanya tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun. Richard Jenkins, *The Place of Theory: John Rex's Contribution to the Sociological Study of Ethnicity and Race* (London: Polity Press, 2007), hal. 10.

tidak bersifat parsial. Untuk itu, menurut pandangan sementara, teori yang diperlukan adalah multikultural komprehensif, yakni adanya kesadaran dan penerimaan berbeda, aspek nilai (catur norma) yang mengatur, penghargaan perbedaan di ruang privat dan publik, pelibatan segenap unsur secara sadar dan *bottom up* dalam proses penciptaan nilai dan penarapannya, dan upaya pemupukan kepercayaan secara terus menerus. Bangunan teori komprehensif dimaksud sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1. Konsepsi Kerukunan Berwawasan Multikultur



Dalam konteks kajian ilmiah ini, konsep ini akan digunakan sebagai alat untuk melihat lebih spesifik kebijakan hukum/ketentuan formal yang dibuat pemerintah dalam tujuan mengatur hubungan umat yang harmonis;

yakni sejauh mana kebijakan tersebut melibatkan atau memberi tempat pada segenap komunitas, baik dalam proses maupun implementasinya—upaya pemupukan yang ditempuh untuk menanamkan pemahaman dan meraih kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan, hasil kebijakan yang diraih, yakni apakah terwujud kehidupan bangsa yang harmonis berlandaskan wawasan multikultural yang kuat.

Bangsa Indonesia sangat majemuk, baik dari suku bangsa, adat istiadat maupun agama. Di samping majemuk, penduduk Indonesia hidup tersebar dalam ribuan pulau dan juga tidak merata dalam persebarannya. Ada pulau yang relatif kecil seperti pulau Jawa dihuni penduduk yang sangat padat. Sebaliknya ada pulau yang sangat luas seperti pulau Irian (Papua) dihuni oleh penduduk yang relatif sedikit. Persebaran penganut agama juga sangat variatif, penganut Islam mayoritas di pulau-pulau Sumatera, Jawa Madura, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Sumbawa dan pulau-pulau kecil lainnya di wilayah Maluku Utara. Sementara agama Kristen relatif mayoritas di Irian (Papua), Katolik di Flores, NTT, sementara Hindu di pulau Bali. Selain itu terdapat persoalan segregasi penduduk berdasarkan agama seperti di Maluku, dimana dijumpai perkampungan yang dihuni khusus penganut Kristen, dan kampung lain didiami penduduk beragama Islam, suatu kondisi yang tercipta sejak masa pemerintahan kolonial. Kemajemukan seperti ini tentu memerlukan perhatian tersendiri dalam pengelolaannya jika ingin diorientasikan untuk menjadi kekuatan bangsa.

Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan di awal, pada masa penjajahan Belanda saja, meskipun dengan terpaksa, karena disadari bahwa rakyat Indonesia sebagian besar beragama Islam sedangkan dalam ajaran Islam terdapat unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan kenegaraan, maka pemerintah Hindia Belanda mengatur dan mengawasi bidang agama, demi menjaga keamanan dan ketertiban serta kepentingan rakyat. Tetapi, dalam parakteknanya, kebijakan kolonial Belanda mengutamakan kepentingan mereka sendiri sebagai negara kolonial. Politik keagamaan kolonial itu didasarkan atas saran Snouck Haurgronje, yaitu: “*Sungguhpun menurut prinsip*

yang tepat, bahwa campur tangan dalam bidang agama adalah salah, namun jangan dilupakan, bahwa dalam sistem Islam terdapat sejumlah permasalahan yang tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan negara yang bagi suatu pemerintahan baik tidak boleh lalai untuk mengurusnya.”<sup>18</sup>

### ***Pancasila Sebagai Instrumen Kebijakan: Menegakan Toleransi Pada Aras Lokal***

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa, dan agama yang tersebar di berbagai pulau besar dan kecil. Kemajemukan bangsa Indonesia, di satu sisi, memang merupakan sumber potensi kekayaan budaya bangsa yang sangat berharga. Di sisi lain, kemajemukan bangsa Indonesia juga dapat menjadi sumber potensi ketegangan dan konflik sosial. Di antara potensi konflik yang sangat mengancam integrasi nasional adalah konflik sosial yang bernuansa keagamaan, yang memang sejak masa lalu hubungan antar umat beragama yang berbeda tidak selalu harmonis.<sup>19</sup>

Menyadari tentang besarnya potensi konflik yang bernuansa keagamaan, para pendiri bangsa Indonesia telah meletakkan dasar negara Indonesia secara tepat, yakni Pancasila. Dapat dikatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara substansial sangat masuk akal untuk dapat mengayomi kemajemukan kelompok agama masyarakat Indonesia. Di satu sisi, dapat dikatakan bahwa dasar negara Indonesia tersebut mencerminkan adanya penghargaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai *ukhrowi* yang dianut semua pemeluk agama. Indonesia bukan negara agama. Di sisi lain, dasar negara Indonesia juga sangat menghargai adanya nilai-nilai duniawi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sosial meskipun bukan negara sekuler. Namun demikian, dalam realita ketegangan dan konflik antar umat beragama tetap saja terjadi, terutama karena “adanya benturan

<sup>18</sup> Mursyid Hasbullah et.al, *Amal Bakti Departemen Agama 3 Januari 1946-3 Januari 1987: Eksistensi dan Derap Langkahnya* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1987), hal. 7.

<sup>19</sup> Zainuddin, *Kebijakan Politik Pemerintah Pada Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Balitbang Kemenag, 2014), hal. 57.

kepentingan antar kelompok sosial satu sama lain”.

Keberadaan konflik dalam setiap bangsa merupakan sesuatu yang normal, karena hukum alam (*sunnatullah*) yang menjadi salah satu sumber perubahan dan pembaharuan sosial. Akan tetapi, konflik yang tidak terkendali dalam skala tertentu dapat menjadi sumber disintegrasi sosial yang dapat mengancam integrasi nasional. Karena itu yang diperlukan dalam menghadapi potensi konflik dalam masyarakat adalah kewaspadaan. Dengan cara melakukan pengendalian terhadap dinamika kelompok-kelompok sosial agar tidak terjadi benturan sosial yang dahsyat. Pengendalian terhadap konflik sosial dalam sebuah negara tentu sangat tergantung kepada strategi para pemimpin bangsa itu sendiri. Masing-masing pemimpin memiliki caranya tersendiri dalam mencegah konflik sosial dan membangun ketahanan nasionalnya.

Karena konflik keagamaan telah melibatkan keyakinan yang sangat fundamental, yakni menyangkut aspek keimanan. Tetapi bukan berarti bahwa konflik yang bernuansa keagamaan ini tidak bisa diatasi. Pendekatan untuk mencegah munculnya konflik perlu lebih komprehensif dan integral. Hal ini karena, terjadinya konflik yang bernuansa keagamaan tidak hanya disebabkan oleh faktor keagamaan semata, tetapi boleh jadi faktor lain seperti aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan—baik pada tingkat lokal maupun nasional. Dengan pendekatan yang lebih integral dan komprehensif, konflik antar umat beragama akan dapat diketahui akar-akar permasalahannya, yang selanjutnya dapat diwaspadai dan diupayakan untuk dicegah. Jangan sampai konflik yang bernuansa keagamaan berkembang, meluas, dan membahayakan disintegrasi bangsa.<sup>20</sup>

Konflik antar umat beragama sebagaimana dikemukakan pada bagian pendahuluan di atas, terjadi sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan dan benturan kepentingan antar kelompok. Karena itu yang diperlukan dalam kehidupan bangsa ini bukan untuk menghilangkan konflik secara

---

<sup>20</sup> Zainuddin, *Kebijakan Politik Pemerintah Pada Kerukunan Umat Beragama*.

total—suatu upaya yang tidak mungkin—tetapi mewaspadai dan mencegah terjadinya ketegangan dan konflik antar umat beragama agar jangan sampai memecah belah integrasi nasional.

Dalam menjaga kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa, sebagai instrumen dan perekat integrasi nasional bangsa Indonesia, negara ini telah memiliki Undang-Undang Dasar (UUD) dan aturan yang tertuang dalam falsafah hidup; Pancasila. Secara singkat, paradigma pembangunan nasional mengacu kepada dua instrumen bangsa; Pancasila dan UUD. Sejatinya dua instrumen ini dapat dijadikan sebagai pijakan dasar dalam menyusun kebijakan yang bermuara kepada toleransi dalam bingkai pluralisme.

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila sudah menjadi sebuah nilai yang sangat dijunjung tinggi dan sangat dihormati. Pasalnya, Pancasila merupakan dasar negara yang dapat digunakan sebagai falsafah, pandangan hidup dan landasan moral berbangsa. Dari berbagai kajian dan pandangan umum masyarakat, isi dari butir-butir Pancasila telah mencerminkan adanya nilai-nilai luhur keagamaan, kemanusiaan dan nilai sosial yang sifatnya universal, serta dapat mendorong terwujudnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia menjadi satu bangsa yang kokoh. Adanya nilai-nilai luhur yang bersifat universal tersebut, Pancasila dapat dinilai telah menampung keanekaragaman aspirasi keagamaan dari seluruh umat beragama sebagai komponen bangsa yang bersatu. Secara singkat, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam butir-butir Pancasila, dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran untuk mencegah konflik antar umat beragama.<sup>21</sup>

Nilai luhur Pancasila telah menjadi instrumen penting negara dalam menyusun kebijakan pluralisme berbangsa. Itulah landasan kuat yang penulis temukan ketika melihat kasus proses migrasi suku Batak Kristen ke daerah pedalaman suku Duri di Bengkalis. Dari pengalaman lapangan penulis, interpretasi nilai dari instrumen kebijakan membangun negara yang toleransi dapat ditemukan dalam dua aspek, yakni interpretasi nilai sila pertama dan

---

<sup>21</sup> Hamdan Daulay, *Membangun Kerukunan Beragama dan Berpolitik di Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Lekugama, 2012), hal. 84.

kedua dari Pancasila.

Sila pertama yang menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah salah satu sila Pancasila yang menjadi perekat semua agama. Mengapa? Karena semua agama yang ada, khususnya di Bengkalis, telah mengakui dan meyakini tentang adanya Tuhan yang satu, yang Maha Kuasa dan Maha Besar. Meskipun cara mengekspresikannya antara agama satu dengan yang lain berbeda-beda. Dalam teks pembukaan UUD 1945 berbunyi: *“Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa... ”*. Pernyataan “Ketuhanan yang Maha Esa” tersebut mengandung makna bahwa bangsa Indonesia hendaknya bersifat religius, menjunjung tinggi manusia yang beragama, dan mempercayai terhadap Tuhan yang Maha Esa apapun nama agamanya.

Sila kedua dengan pernyataan singkat Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung nilai universal. Masyarakat hendaknya memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghargai hak asasi kemanusiaan, menghormati dan mencintai sesama manusia tanpa pandang perbedaan agama, asal usul suku bangsa, tingkat status sosial dan kekayaan, jabatan dan pangkat. Dengan dasar pernyataan ini bangsa Indonesia didorong untuk berlaku adil dalam bersikap dan bertindak, dalam menyelesaikan masalah, dalam memutuskan perkara terhadap siapapun sesama manusia ciptaan Tuhan.

## **Migrasi dan *Outlook* Agamawan**

Sub tema ini membahas dua aspek yang berbeda. Pertama, membahas tentang migrasi suku Batak Kristen ke daerah Muslim Melayu pedalaman Duri, Bengkalis. Kedua, padangan tokoh agama atas kasus migrasi. Berikut kondisi faktual tentang kasus migrasi yang penulis temukan yang didasarkan atas temuan lapangan.

## *Dampak Migrasi yang Menimbulkan Percikan Konflik*

Faktor kecurigaan dan anggapan kristenisasi adalah pemicu utama lahirnya percikan konflik. Faktualitas data lapangan kasus migrasi suku Batak Kristen dicurigai karena faktor pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, dan perayaan hari besar keagamaan.<sup>22</sup> Pertama, *pendirian rumah ibadah*. Berdirinya sebuah tempat ibadah merupakan simbol adanya kehidupan, perkembangan dan peningkatan kualitas dan fasilitas keagamaan. Karena melalui tempat ibadah ini ritual keagamaan dapat dilakukan lebih khidmat dan nyaman. Demikian juga dengan tempat ibadah, konsentrasi kegiatan keagamaan dapat dibangun, dibina, dikembangkan dan dikoordinasikan. Karena itu, tempat ibadah akan menjadi simbol kebanggaan, kesucian dan sekaligus mengandung harga diri pada kebanyakan jamaah keagamaan.

Bagi penganut agama yang memperjuangkan berdirinya rumah ibadah, keberhasilan membangunnya jelas akan membawa kepuasan spiritual tersendiri, karena upaya tersebut merupakan bagian dari ibadah agamanya atau pengabdian terhadap yang Maha Kuasa. Secara subyektif, kegiatan membangun tempat ibadah ini tentu dapat dinilai sebagai langkah positif bagi kelompok agama yang mendirikan tempat ibadah.

Tetapi bagi kelompok agama lain kehadiran tempat ibadah baru yang bukan dibangun dari kelompok agamanya akan dipandang secara subyektif pula sebagai ancaman terhadap eksistensinya umatnya. Kehadiran tempat ibadah agama lain di wilayah atau lingkungannya, pada umumnya tidak akan disenangi. Di sinilah awal lahirnya ketegangan keagamaan—suku Batak Kristen dengan Muslim Melayu di pedalaman Duri—yang dapat membangun potensi konflik antar umat beragama, yang pada setiap saat dapat melahirkan konflik kekerasan.

Kedua, *penyiaran agama*. Bagi setiap agama, penyiaran agama merupakan kegiatan yang sangat mulia dan terpuji. Kegiatan penyiaran agama adalah bagian dari panggilan atau ajaran agamanya yang harus dilakukan, baik

---

<sup>22</sup> Zainuddin, *Kebijakan Politik Pemerintah Pada Kerukunan Umat Beragama*.

secara langsung atau tak langsung, melalui lisan maupun tulisan. Penyiaran agama ini memang memiliki misi yang mulia, yakni mengajarkan kebenaran, mengajak berbuat kebajikan dan tolong menolong, mengajak umat manusia menjauhi tindakan kejahatan yang tidak manusiawi, dan perilaku-perilaku yang merugikan orang lain.

Namun dalam kenyataan sosial, penyiaran agama tidak selalu terpuji dan bahkan penyiaran agama dapat menyebabkan terjadinya konflik antar umat beragama. Hal ini karena penyiaran agama telah membawa pada benturan kepentingan antara penganut agama satu dengan yang lain. Benturan kepentingan itu terjadi apabila kegiatan penyiaran agama ditujukan kepada individu atau kelompok yang telah memeluk agama tertentu agar pindah ke agama lain. Pada umumnya, semua kelompok agama di Duri Bengkalis, akan tidak rela apabila anggota jamaahnya pindah ke agama lain, apalagi apabila perpindahan itu akibat dari pengaruh misi agama lain.

Ketiga, *perayaan hari besar keagamaan*. Penyelenggaraan perayaan hari-hari besar keagamaan merupakan kegiatan yang baik menurut agama yang bersangkutan. Hal ini karena kegiatan perayaan hari besar keagamaan dapat berfungsi sebagai media silaturahmi, memperkuat hubungan antara anggota jamaah satu dengan yang lain, serta untuk menunjukkan adanya kepedulian terhadap agamanya. Di samping juga untuk memperlihatkan eksistensi kehidupan agama.

Perayaan hari besar keagamaan ini dapat menjadi sumber potensi ketegangan dan konflik keagamaan antar kelompok yang ada di Duri Bengkalis. Ada beberapa kejadian dari kelompok agama yang melakukan perayaan tidak menyesuaikan dengan kondisi, situasi di mana tempat perayaan tersebut berlangsung. Perayaan hari besar keagamaan yang dipandang mengganggu eksistensi agama Islam, akhirnya menyulut lahirnya konflik keagamaan.

### *Outlook Agamawan atas Kasus Migrasi*

Tokoh-tokoh Islam di Duri (Ermi Marwati, Syarifuddin Hasibuan,

Hidayatulloh, Zainuddin, Usman) dalam memahami kerukunan umat beragama masih tergolong agak sempit karena masih adanya panatisme yang berlebihan. Kehadiran orang asing (yang berbeda agama) di daerah ini, dianggap sebagai gangguan. Bahkan mereka menganggap kehadiran orang yang berbeda agama itu sebagai musuh. Itulah sebabnya, seiring dengan perkembangan daerah Duri yang semakin maju (banyak kebun sawit), membuat semakin banyak kehadiran masyarakat luar ke daerah ini, termasuk yang berbeda agama. Dalam perkembangan berikutnya, masyarakat yang berbeda agama tersebut (Kristen), membutuhkan Gereja sebagai tempat ibadah. Namun di sisi lain, muncul penolakan yang keras dari tokoh-tokoh Islam.

“Menurut Sarjana Syakir Nasution, yang merupakan tokoh Islam di daerah Duri, penolakan umat Islam pada pembangunan gereja di daerah Duri bukanlah karena kebencian pada Kristen. Alasan utamanya adalah karena belum sesuai dengan aturan main yang ada. Masyarakat sekitar belum memberi ijin, jumlah warga Kristen yang ada di daerah ini belum layak membangun Gereja, dan pemerintah setempat juga belum memberi ijin. Ketika mereka tetap memaksakan keinginan membangun gereja tanpa melalui prosedur yang resmi, maka terjadilah konflik di tengah masyarakat. Ketika itu puluhan pemuda Islam merusak Gereja yang dibangun tanpa prosedur.”<sup>23</sup>

Sebelum terjadi peristiwa pembakaran Gereja tersebut, sesungguhnya sudah beberapa kali diadakan dialog. Tujuannya agar semua pihak bisa menahan diri dan mematuhi aturan yang ada. Tokoh-tokoh Islam juga sudah menyampaikan keberatan, agar jangan sampai dibangun gereja kalau belum dilengkapi persyaratan yang ada. Namun karena mereka tetap memaksakan keinginan, dengan alasan sepihak bahwa mereka butuh tempat ibadah. Akibatnya muncullah tindakan yang emosional dari kelompok pemuda Islam dengan merusak Gereja yang dianggap pembangunannya menyalahi aturan main yang dibuat oleh pemerintah.

“Ermi dan Hidayatulloh menjelaskan, bahwa walaupun sama-sama warga negara yang taat dengan Pancasila, ketidakharmonisan tetap saja terjadi karena perbedaan agama. Budaya Batak dan Melayu yang seharusnya memiliki perekat dan kekerabatan antara satu dengan yang lain, namun

<sup>23</sup> Sarjana Syakir Nasution, Wawancara, 3 Nopember 2016

realitanya faktor perbedaan agama membuat masyarakat di Duri kurang harmonis, dengan adanya penolakan umat Islam pada pembangunan Gereja di daerah ini.”<sup>24</sup>

Penjelasan Ermi dan Hidayatulloh memperkuat analisis bahwa ternyata, budaya Batak dan Melayu memiliki konsep kekerabatan dan kerukunan, namun belum mampu diaktualisasikan dalam kehidupan beragama. Perbedaan agama membuat mereka terjebak dalam kondisi yang kurang harmonis, saling curiga, bahkan menolak kehadiran minoritas yang berbeda agama dengan mereka yang mayoritas.

Hubungan yang kurang harmonis antara kelompok Islam dengan Kristen di Duri memang bisa disebabkan berbagai faktor. Selain karena persoalan izin yang belum lengkap dalam mendirikan Gereja, ada juga karena faktor ketertutupan budaya. Masyarakat Melayu Muslim di daerah Duri belum siap menerima kehadiran kelompok masyarakat lain yang berbeda agama, karena selama ini mereka beranggapan bahwa daerah Duri adalah daerah orang Muslim. Paham sempit yang demikian tentu bertentangan dengan makna Bhinneka Tungga Ika. Apalagi dikaitkan dengan makna Pancasila dan UUD 1945, bahwa negara menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara.

”Tidaklah benar kalau umat Islam dikatakan menolak pembangunan Gereja di Duri. Persoalan utamanya adalah harus sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau umat Kristen membangun Gereja dengan memaksakan kehendak dan mengabaikan aturan yang ada tentu akan menghadapi perlawanan dari kelompok Islam. Seandainya mereka mengikuti aturan main yang ada tentu umat Islam pun akan taat dengan aturan. Umat Islam di daerah ini bisa hidup berdampingan dengan umat agama lain, asalkan saling menghargai dan menghormati.”<sup>25</sup>

Pendapat Zainuddin dan Usman tersebut semakin memperjelas bahwa umat Islam di Duri bukanlah masyarakat yang pemaarah dan fanatisme buta. Persoalannya menurut Haji Damanhuri, “*kelompok pendatang (umat Kristen) harus mengikuti aturan main yang ada agar suasana damai dan sejuk bisa diwujudkan di daerah*

---

<sup>24</sup> Ermi dan Hidayatulloh, Wawancara, 3 Nopember 2016

<sup>25</sup> Zainuddin dan Usman, Wawancara, 2 Nopember 2016

ini”.<sup>26</sup> Sebaliknya manakala ada kelompok yang tidak taat pada aturan, maka akan muncullah konflik antara kelompok yang berbeda agama. Sungguh sangat disayangkan manakala terjadi hubungan yang kurang harmonis antara kelompok masyarakat yang berbeda agama.

Hubungan Islam dengan Kristen di daerah ini masih perlu pembinaan. Pemerintah melalui kementerian Agama diharapkan bisa terus meningkatkan kegiatan dialog antarumat beragama di daerah Duri, agar ke depan bisa terwujud kerukunan yang lebih kuat. Sikap curiga, benci, dan kurang menghargai antara kelompok satu dengan kelompok lain harus diselesaikan dengan dialog yang jujur dan tulus.<sup>27</sup>

Pendapat Haji Syarifuddin Hasibuan tersebut merupakan solusi yang tepat dalam rangka memperkokoh kerukunan hidup antar umat beragama di Duri. Solusi dialog antarumat beragama di daerah Duri memang harus terus ditingkatkan agar hubungan yang kurang harmonis selama ini bisa berubah menjadi lebih cair, lebih sejuk, dan saling menghargai. Dialog tersebut tentu harus dilakukan secara kontiniu dan diharapkan pemerintah (Kemenag) pun bisa memberi dukungan untuk terselenggaranya dialog tersebut. Dengan demikian, diharapkan ke depan bisa terwujud hubungan yang lebih baik antara Islam dengan Kristen di daerah Duri.

Bagi tokoh-tokoh Kristen di Duri, sebagai kelompok minoritas menyadari bahwa kehadiran mereka yang dianggap pendatang masih mendapat penolakan dari kelompok Melayu Muslim yang mayoritas di daerah ini. Mereka menyadari adanya kecurigaan dengan kehadiran kelompok lain yang berbeda agama dengan agama Islam yang mayoritas. Walaupun sudah beberapa kali diadakan dialog antara tokoh agama, namun dalam kenyataannya masih ada kesan hubungan yang kurang harmonis.

“Kelompok Kristen yang minoritas dan juga merupakan masyarakat pendatang menghadapi berbagai kesulitan berdaptasi dengan masyarakat setempat, terutama dalam hal membangun gereja sebagai hak bagi setiap warga negara untuk menjalankan agama yang dijamin undang-undang. Sebagai pendatang dan juga kelompok agama minoritas, seolah belum mendapat penerimaan yang baik dari masyarakat setempat. Sangat

<sup>26</sup> Haji Damanhuri, Wawancara, 4 Nopember 2016.

<sup>27</sup> Syarifuddin Hasibuan, Wawancara, 2 Nopember 2016.

berliku jalan yang harus kami tempuh, dan akhirnya tetap belum bisa mendapat ijin dari pemerintah setempat. Padahal sesungguhnya umat Kristen di daerah sudah cukup layak untuk memiliki tempat ibadah.”<sup>28</sup>

Ungkapan perasaan yang disampaikan Bonar terkait dengan realitas sosial yang dihadapi di daerah Duri merupakan potret riil kehidupan beragama yang mereka hadapi. Terkadang apa yang dibaca dalam teks undang-undang terkait dengan adanya jaminan negara kepada setiap warga negara untuk menjalankan agamanya masing-masing masih menghadapi jalan berliku dalam realitanya di masyarakat. Pendekatan sosial yang baik sesuai dengan kondisi budaya masyarakat setempat harus diikuti dengan hati-hati. Dengan demikian, diperlukan proses panjang untuk bisa saling meyakinkan bahwa kehadiran kelompok lain sesungguhnya bukanlah menjadi gangguan justru bisa menjadi kekayaan khazanah budaya yang akan saling mengisi dan melengkapi. Namun sebaliknya, manakala perbedaan yang ada sudah diawali dengan sikap saling curiga akan membuat komunikasi tersumbat, sehingga yang akan muncul adalah kebencian, fitnah bahkan konflik.

Kasus yang terjadi di Duri dengan adanya hubungan yang kurang harmonis antara kelompok Islam dengan kelompok Kristen dan dari segi etnis antara Batak dengan Melayu menjadi persoalan serius untuk dianalisis. Ini menunjukkan bahwa ternyata faktor budaya belum begitu kuat menjadi perekat kerukunan di daerah ini. Adanya perbedaan agama membuat unsur budaya tersebut tak berdaya memperkokoh hubungan sosial diantara mereka. Justru kesamaan agama di tengah perbedaan budaya lebih mampu memperkokoh hubungan sosial di daerah ini. Ini bisa dilihat dengan harmonisnya hubungan masyarakat Batak Muslim dengan masyarakat Minang dan Jawa yang sama-sama Muslim.

Kondisi yang kurang harmonis antara Islam dengan Kristen di Duri juga diungkapkan Sahut Simatupang yang merupakan tokoh Kristen di daerah ini. Menurut Sahut, *“adanya penolakan dari kelompok Islam pada pembangunan gereja di daerah ini adalah karena adanya kecurigaan akan terjadi kristenisasi di tengah*

---

<sup>28</sup> Bonar Situmorang, Wawancara, 3 Nopember 2016

*masyarakat yang selama ini kental dengan budaya Islam*".<sup>29</sup> Padahal sesungguhnya tidak ada niat melakukan praktik Kristenisasi. Keinginan untuk mendirikan gereja adalah semata-mata karena kebutuhan yang sangat mendasar seiring dengan semakin banyaknya jumlah umat Kristen di daerah ini. Kehadiran warga Kristen di daerah ini juga sebagian adalah karena tugas negara, ada yang menjadi guru, PNS, polisi, jaksa, hingga pekerja di perkebunan. Tentu sebagai warga negara yang dijamin oleh negara dalam menjalankan ibadah, mereka sangat membutuhkan tempat ibadah (Gereja).

Pandangan yang disampaikan Sahut tersebut memperkuat pendapat Bonar Situmorang, bahwa soal pembangunan Gereja yang mendapat penolakan dari kelompok Islam menjadi sumber tersumbatnya komunikasi antara Islam dengan Kristen. Masing-masing pihak memiliki argumen yang kuat untuk membela pendapatnya, sehingga belum bisa terwujud komunikasi yang baik. Idealnya ke depan perlu terus ditingkatkan dialog agama antara kelompok yang berbeda agama, sehingga bisa muncul sikap saling menghargai dan menghormati, dan pada tahap berikutnya akan terwujud toleransi yang membuat kedua belah pihak saling mendukung kepentingan agama masing-masing. Betapa indahnyanya kondisi masyarakat yang harmonis di tengah perbedaan yang ada.

## **Dialog antar Agama: Merangkai yang Terberai**

Salah satu problem yang dihadapi dalam membina kerukunan umat beragama di Duri adalah karena masih kurangnya dialog agama. Padahal, melalui dialog yang rutin akan bisa membuka komunikasi menjadi lebih baik. Program pemerintah lewat Kementerian Agama yang mempunyai program gerakan kerukunan belum teraktualisasi di masyarakat Duri. Untuk itu, pemerintah hendaknya memiliki pemetaan di daerah-daerah mana yang rawan konflik dan harus ada afirmatif kebijakan dengan kegiatan dialog agama.

---

<sup>29</sup> Sahut Simatupang, Wawancara, 4 Nopember 2016.

Kalau ada pihak yang memfasilitasi kegiatan dialog agama di Duri secara bertahap akan mencair nanti ketidak harmonisan yang terjadi selama ini. Dialog agama di Duri bisa dipelopori oleh pemerintah (Kemenag) dan juga lembaga sosial yang memiliki komitmen pada pembinaan kerukunan. Sebab di tempat lain, ketidak harmonisan antarumat beragama bisa menjadi cair tatkala dialog agama dilakukan secara rutin. Melalui dialog agama kedua belah pihak yang kurang harmonis bisa berkomunikasi dengan jujur dan terbuka, sehingga berbagai persoalan yang mengganjal bisa diselesaikan. Sebab realitas di masyarakat tidak bisa hanya dengan menerapkan banyak teks undang-undang yang mengatakan setiap warga negara bebas menjalankan agamanya yang dijamin oleh negara.

Tidak ada yang salah dalam bunyi aturan tersebut, namun dalam implementasi di lapangan tetap diperlukan komunikasi. Karena masyarakat yang sangat dinamis memerlukan berbagai pendekatan, komunikasi dan tindakan yang satu. Dengan demikian, kalau tidak ada lagi kecurigaan dan kesalahpahaman antara kelompok satu dengan yang lain maka akan membuat terwujud kerukunan, keterbukaan, dan kerelaan untuk menerima kehadiran orang lain di tengah perbedaan yang ada.

Problem serius yang terjadi di Duri terkait dengan pembinaan kerukunan umat beragama adalah karena faktor kuatnya sikap saling curiga. Umat Islam yang mayoritas di daerah ini masih memiliki rasa curiga yang tinggi pada kehadiran kelompok Kristen. Demikian pula sikap masyarakat Kristen pada umat Islam dicurigai memiliki niat yang buruk untuk menolak kehadiran mereka dengan menyebut tidak paham makna pluralisme. Bahkan kelompok Kristen menganggap masyarakat Islam di Duri memiliki pendidikan yang rendah karena sikap penolakan pada kelompok lain.

Sikap saling curiga yang demikian tentu menjadi penghambat terbukanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Karena kalau sudah diawali dengan persepsi yang negatif pada kelompok lain, maka yang akan terjadi nanti adalah kebencian dan fitnah, dengan menganggap kelompok lain itu serba negatif dan diposisikan sebagai musuh. Sikap saling curiga tentu

akan merugikan semua pihak. Padahal kalau mereka mau berpikir jernih, kelompok lain dalam kehidupan bermasyarakat pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihan dan kekurangan yang ada itu bisa saling melengkapi tentu akan menjadi potensi besar dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan maju.

Sikap curiga kelompok Kristen pada umat Islam di Duri yang dinilai belum berpikiran maju sering membuat potensi konflik. Demikian pula kelompok Islam akhirnya semakin curiga dengan kelompok Kristen yang dianggap memiliki program tersembunyi untuk melakukan Kristenisasi di daerah ini. Itulah sebabnya umat Islam di daerah ini melakukan penolakan yang keras pada kehadiran Gereja. Ketika umat Kristen tetap membangun Gereja tanpa mengikuti aturan yang ada, membuat kemarahan umat Islam, sehingga terjadilah perusakan rumah ibadah di daerah ini pada awal tahun 2016.

## **Penutup**

Problem serius yang terjadi di daerah Duri terkait dengan pembinaan kerukunan umat beragama adalah karena faktor kuatnya sikap saling curiga. Umat Islam yang mayoritas di daerah ini masih memiliki rasa curiga yang tinggi pada kehadiran kelompok Kristen. Demikian pula sikap masyarakat Kristen pada umat Islam dicurigai memiliki niat yang buruk untuk menolak kehadiran mereka dengan menyebut tidak paham makna pluralisme. Bahkan kelompok Kristen menganggap masyarakat Islam di daerah Duri memiliki pendidikan yang rendah karena sikap penolakan pada kelompok lain.

Sikap saling curiga yang demikian tentu menjadi penghambat terbukanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Karena kalau sudah diawali dengan persepsi yang negatif pada kelompok lain, maka yang akan terjadi nanti adalah kebencian dan fitnah, dengan menganggap kelompok lain itu serba negatif dan diposisikan sebagai musuh. Sikap saling curiga tentu akan merugikan semua pihak. Padahal kalau mereka mau berpikir jernih,

kelompok lain dalam kehidupan bermasyarakat pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihan dan kekurangan yang ada itu bisa saling melengkapi tentu akan menjadi potensi besar dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan maju.

Sikap curiga kelompok Kristen pada umat Islam di daerah Duri yang dinilai belum berpikiran maju sering membuat potensi konflik. Demikian pula kelompok Islam akhirnya semakin curiga dengan kelompok Kristen yang dianggap memiliki program tersembunyi untuk melakukan Kristenisasi di daerah ini. Itulah sebabnya umat Islam di daerah ini melakukan penolakan yang keras pada kehadiran Gereja. Ketika umat Kristen tetap membangun rumah ibadah tanpa mengikuti aturan yang ada, membuat kemarahan umat Islam, sehingga terjadilah tindakan perusakan pada tempat ibadah yang sesungguhnya sangat bertentangan dengan nilai toleransi dan kerukunan. Oleh karena itu, penulis mendorong ada perubahan afirmatif kebijakan dalam bingkai dialog agama.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, Lutfi. *Transmigrasi dan Penguatan Ekonomi*. Jakarta: Gramedia, 2009.
- Ardbuckle, Gerald A. "Multiculturalism, Internationality, and Religious Life." *Review for Religious* 54, no. 1 (1995).
- Budiwanti, E. "Pluralism Collapses: A Study of the Jama'ah Ahmadiyah Indonesia and Its Persecution." *Asia Research Institute Working Paper*, no. 117 (2009). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1645144>.
- Budiyono, Ap. *Membina Kerukunan Hidup Antarumat Beriman*. Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2011.
- Burahanuddin Yahya. *Kerukunan dan Toleransi di Tengah Pluratis Bangsa*. Jakarta: Yayasan Ilmu, 2008.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Deddy, Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.

- Douglas, E. Ramage. *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*. London: Routledge, 1995.
- Hakim, Lukman Nul. "Tindak Kekerasan Terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia : Sebuah Kajian Psikologi Sosial." *Aspirasi* 2, no. 1 (2012): 23–44.
- Hamdan, Daulay. *Membangun Kerukunan Beragama dan Berpolitik Di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Lekugama, 2012.
- Hasbullah, Mursyid, and et.al. *Amal Bakti Departemen Agama 3 Januari 1946-3 Januari 1987: Eksistensi dan Derap Langkahnya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1987.
- Ichwan, Moch Nur. "MUI, Gerakan Islamis, dan Umat Mengambang." *Ma'arif Institute*. Jakarta, 2016.
- Jacqueline Hicks. "Heresy and Authority: Understanding the Turn against Ahmadiyah in Indonesia." *South East Asia Research* 22, no. 3 (2014): 321–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.5367/sear.2014.0216>.
- Jenkins, Richard. *The Place of Theory: John Rex's Contribution to the Sociological Study of Ethnicity and Race*. London: Polity Press, 2007.
- John Rex. "Multicultural and Plural Societies." In *The Ethnicity Reader*, edited by Guiberneau Montserrat and John Rex. London: Polity Press, 1997.
- Kodiran. *Pluralitas dan Kekayaan Kazanah Budaya Indonesia*. Bandung: Rosdakarya, 2013.
- Makin, Al. "Homogenizing Indonesian Islam: Persecution of the Shia Group in Yogyakarta." *Studia Islamika* 24, no. 1 (2017): 1–32. <https://doi.org/10.15408/sdi.v24i1.3354>.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mudji, Sutrisno, and et.al. *Cultural Studies Tantangan Bagi Teori-Teori Besar Kebudayaan*. Yogyakarta: Koekoesan, 2007.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Tariq, Modood, and Werbner Pnina. *The Politics of Multiculturalism in the New Europe: Racism, Identity and Community*. London: Zed Books, 1997.
- Tim Peneliti Infid. "Studi Tentang Toleransi dan Radikalisme di Indonesia, Pembelajaran Dari 4 Daerah, Tasikmalaya, Jogjakarta, Bojonegoro, dan Kupang." Jakarta, 2016.
- Veer, Peter van de. *Nation and Migration: The Politics of Space in the South Asia Diaspora*. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1995.

Williams, Raymond. *Cultural Theory: An Introduction*. Oxford-UK: Blackwell Publishers, 2001.

Zainuddin. *Kebijakan Politik Pemerintah Pada Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Balitbang Kemenag, 2014.